

Pengembangan Pariwisata Halal berdasarkan Aspirasi Masyarakat di Desa Wisata Kabupaten Bandung

Rahadian Muhammad Sutandar¹, Lely Syiddatul Akliyah^{2*}

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rahadiansutandar@gmail.com¹, syiddatul.a@gmail.com^{2*}

Abstract. Halal tourism, grounded in Islamic principles, holds immense potential in Indonesia, particularly in Bandung Regency, which is rich in tourist villages. However, its implementation faces challenges, including a lack of public understanding and participation. This study aims to analyze the aspirations of the Bandung Regency community towards halal tourism policies and formulate recommendations for its development. The research employs a qualitative approach, utilizing questionnaires and in-depth interviews, focusing on respondents of productive age (17-64 years). The findings reveal majority support for halal tourism, driven by its potential economic, social, and cultural benefits. The community also expresses a desire for active participation in its planning and development. However, the study also identifies gaps in understanding the concept of halal tourism, along with concerns about potential discrimination and price increases. Based on these findings, strategic recommendations are proposed, including: (1) Strengthening the regulatory framework and establishing a dedicated halal tourism body, (2) Intensive socialization and education about halal tourism, (3) Developing unique products and services aligned with halal principles, (4) Enhancing the quality of human resources in the halal tourism sector, (5) Utilizing digital technology for efficiency, (6) Fostering cross-sector collaboration, (7) Establishing strong halal tourism branding, and (8) Conducting periodic monitoring and evaluation. These recommendations are expected to maximize the potential of halal tourism in Bandung Regency while ensuring its inclusivity and sustainability.

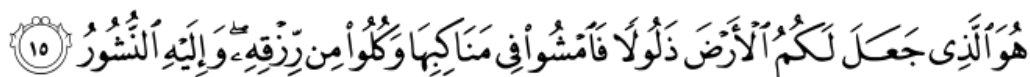
Keywords: *Halal Tourism, Community Aspirations, Tourist Villages.*

Abstrak. Pariwisata halal, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memiliki potensi besar di Indonesia, terutama di Kabupaten Bandung yang kaya akan desa wisata. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung terhadap kebijakan pariwisata halal dan merumuskan rekomendasi pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara mendalam, dengan fokus pada responden berusia produktif (17-64 tahun). Hasil penelitian mengungkapkan dukungan mayoritas masyarakat terhadap pariwisata halal, didorong oleh potensi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat juga menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengembangannya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan pemahaman tentang konsep pariwisata halal, serta kekhawatiran tentang potensi diskriminasi dan kenaikan harga. Berdasarkan temuan ini, diajukan rekomendasi strategis, termasuk: (1) Penguatan kerangka regulasi dan pembentukan badan khusus pariwisata halal, (2) Sosialisasi dan edukasi intensif tentang pariwisata halal, (3) Pengembangan produk dan layanan unik yang selaras dengan prinsip halal, (4) Peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata halal, (5) Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi, (6) Kolaborasi lintas sektor, (7) Branding pariwisata halal yang kuat, dan (8) Pemantauan dan evaluasi berkala. Rekomendasi ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata halal di Kabupaten Bandung, sekaligus memastikan inklusivitas dan keberlanjutannya.

Kata Kunci: *Pariwisata Halal, Aspirasi Masyarakat, Desa Wisata.*

A. Pendahuluan

Pariwisata halal dapat didefinisikan sebagai suatu cabang khusus dalam industri pariwisata yang berupaya memenuhi kebutuhan esensial wisatawan Muslim. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pariwisata halal secara menyeluruh menggabungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam [1] Konsep pariwisata halal berlandaskan Qs: Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



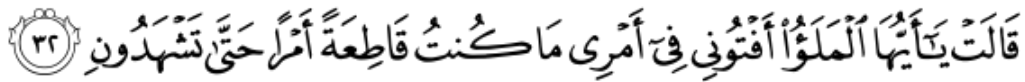
Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs: 67:15)

Kementerian Agama menginterpretasikan ayat ke-15 Surat Al-Mulk sebagai perwujudan kasih sayang Allah kepada umat manusia. Allah menciptakan bumi dengan harmoni dan keindahan guna memudahkan aktivitas kehidupan. Ayat ini mendorong manusia untuk memanfaatkan karunia-Nya melalui pengelolaan pariwisata yang arif demi mencari rezeki melalui usaha yang halal. Tafsir Al-Azhar menegaskan pentingnya mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya bumi secara bijaksana tanpa eksploitasi berlebihan. Pandangan ini diperkuat oleh Tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan dorongan bagi manusia untuk memanfaatkan keberagaman alam untuk mencari nafkah dan berbisnis. Dengan demikian, dalam konteks pariwisata, pariwisata dipandang sebagai sarana untuk memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan syariat Islam, tanpa berlebih-lebihan, dan sejalan dengan perintah-Nya.

Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan statusnya sebagai destinasi wisata paling ramah Muslim selama dua tahun berturut-turut. Pencapaian ini membuka peluang signifikan bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia, mengingat proyeksi kedatangan wisatawan Muslim global akan mencapai 230 juta jiwa pada tahun 2028 dengan potensi pendapatan mencapai 225 miliar dolar Amerika Serikat. Implementasi kebijakan pariwisata halal di desa-desa wisata Kabupaten Bandung dianggap sangat relevan karena adanya sejumlah faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi keragaman destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata alam Islami, mayoritas penduduk Muslim, potensi daya tarik masjid dan pondok pesantren, beragam kegiatan keislaman, peluang usaha terkait busana Muslim dan wisata Islami, aksesibilitas yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana umum yang memadai, serta dukungan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang Islami [2]. Kabupaten Bandung juga merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah desa wisata terbanyak, mencapai 100 desa wisata.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala utama dalam implementasi kebijakan pariwisata halal, salah satunya adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal [3]. Partisipasi masyarakat memiliki peran sentral dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, karena masyarakat merupakan pelaku utama yang terlibat langsung dalam proses tersebut [4]. Efektivitas implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik perlu diupayakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat terlaksana secara optimal [5]. Dukungan terhadap kebijakan dapat dilihat melalui aspirasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan arah strategis dalam perumusan kebijakan [6].

Mempertimbang aspirasi masyarakat terhadap kebijakan Pariwisata halal di desa wisata merupakan salah satu cara untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam melakukan perencanaan seperti tertuang dalam Al-Quran, pada Qs: An-Naml ayat 32 yang berbunyi:



Artinya: Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku).” (Qs: 27:32)

Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa keputusan yang berkualitas adalah keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Aspirasi masyarakat, sebagai manifestasi dari partisipasi aktif, dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mengevaluasi pandangan masyarakat terhadap suatu keputusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung terkait kebijakan pariwisata halal di desa wisata Kabupaten Bandung. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi pengembangan pariwisata halal di desa wisata Kabupaten Bandung berdasarkan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pariwisata halal.

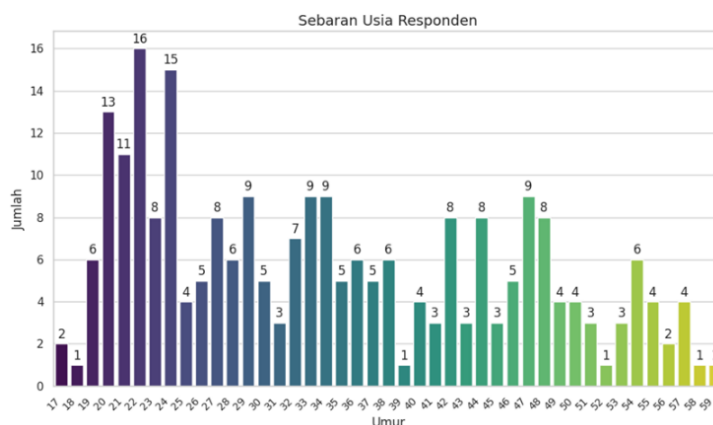
B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan populasi yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data melibatkan penggunaan kuesioner dan wawancara mendalam. Mengingat luasnya cakupan populasi, penentuan responden dilakukan melalui metode purposive sampling dengan kriteria khusus, yaitu masyarakat di Kabupaten Bandung yang berada dalam rentang usia produktif, antara 17 hingga 64 tahun. Kelompok usia ini dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan terkait pariwisata serta mampu memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk menggali makna mendalam dari data yang diperoleh, penelitian ini akan menerapkan teknik analisis konten. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola, dan sentimen yang terkandung dalam respons responden, baik dari kuesioner maupun wawancara, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pariwisata halal di desa Wisata Kabupaten Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

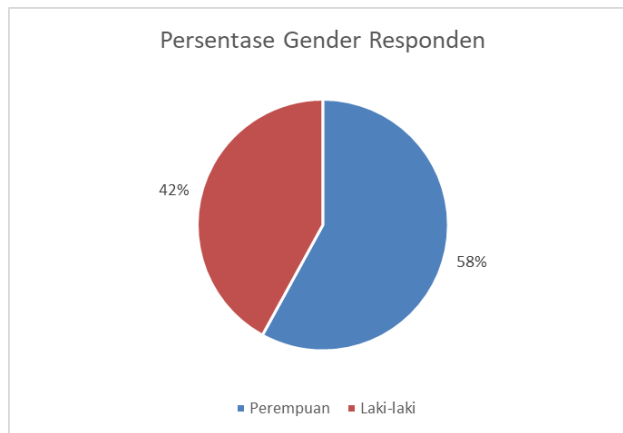
Analisis Konten Aspirasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pariwisata Halal di Desa Wisata Kabupaten Bandung

Berdasarkan 245 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Distribusi usia responden menunjukkan konsentrasi pada usia produktif, dengan usia 22 tahun sebagai yang paling dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan individu yang aktif secara ekonomi dan sosial, serta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam konteks penelitian ini. Rincian distribusi usia responden dapat dilihat pada gambar 1.



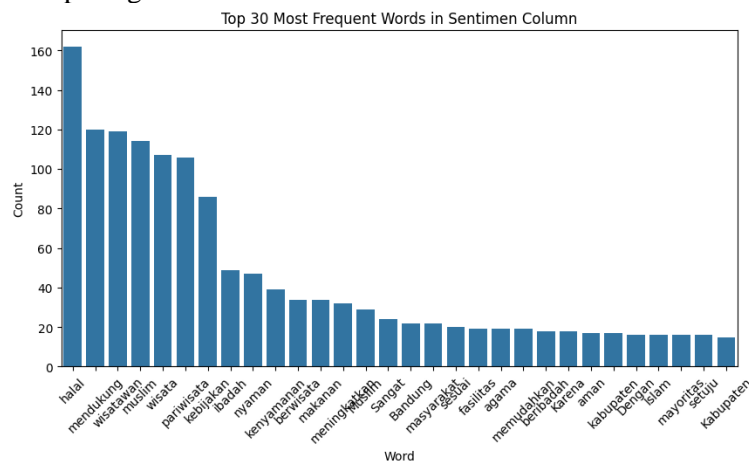
Gambar 1. Distribusi Sebaran Usia Responden (Hasil Analisis, 2024)

Distribusi responden berdasarkan gender menunjukkan proporsi dengan mayoritas responden adalah perempuan (58%) dibandingkan laki-laki (42%) dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Distribusi Persentase Gender Responden (Hasil Analisis, 2024)

Aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pariwisata halal di desa wisata kabupaten Bandung ditunjukkan pada gambar 3.



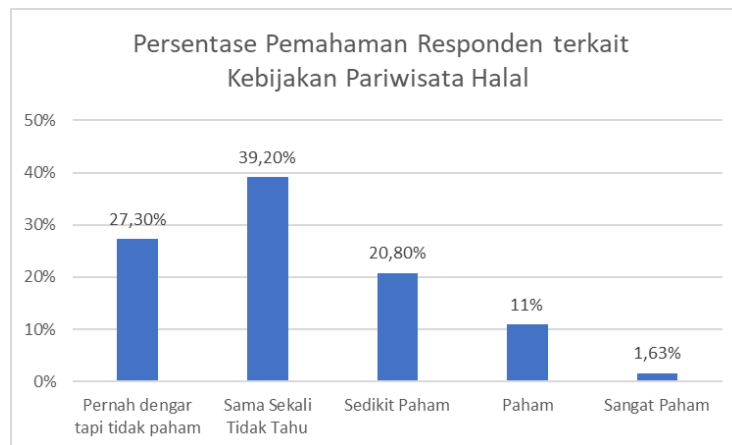
Gambar 3. Sebaran Kata Responden (Hasil Analisis, 2024)

Terkait penerapan kebijakan pariwisata halal di Kabupaten Bandung. Sering muncul Kata-kata seperti "mendukung", "nyaman", "ibadah", dan "meningkatkan" yang mengindikasikan adanya dukungan terhadap pariwisata halal serta perhatian terhadap dampaknya pada wisatawan dan komunitas Muslim. Tampilan pada Worcloud dapat dilihat seperti pada gambar 4.



Gambar 4. WordCloud Aspirasi Masyarakat (Hasil Analisis, 2024)

Kemunculan kata-kata seperti "nyaman," "kenyamanan," "berwisata," "makanan," dan "meningkatkan" menunjukkan bahwa aspek kenyamanan, pengalaman berwisata, dan peningkatan kualitas layanan menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat. Sementara itu, kata-kata seperti "ibadah," "agama," "memudahkan," dan "beribadah" mengindikasikan bahwa aspek religius dan kemudahan dalam menjalankan ibadah juga menjadi perhatian utama dalam konteks pariwisata halal. Meskipun didominasi oleh aspirasi positif. Namun terdapat temuan aspirasi mengenai kebijakan pariwisata halal di desa wisata Kabupaten Bandung yang mempertanyakan efektivitas kebijakan pariwisata halal di Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena berbagai hal diantaranya Responden masih banyak yang belum memahami sepenuhnya konsep pariwisata halal dan manfaatnya bagi masyarakat. Seperti pada gambar 5

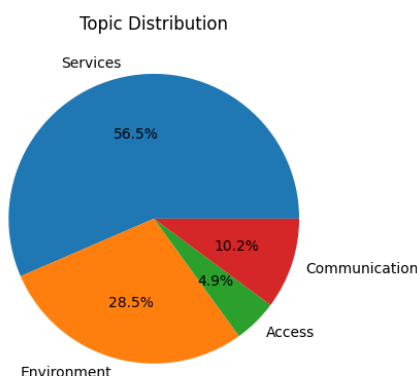


Gambar 5. Persentase Pemahaman Responden terhadap Kebijakan Pariwisata Halal (Hasil Analisis,2024)

Pada gambar 4.12. menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Bandung terkait kebijakan pariwisata halal. Mayoritas responden (39,2%) menyatakan pernah mendengar istilah pariwisata halal namun belum memiliki pemahaman yang mendalam. Sementara itu, 27,3% responden mengaku sama sekali tidak tahu mengenai kebijakan ini. Proporsi responden yang memiliki pemahaman, baik sedikit paham (20,8%) maupun paham (11%), tergolong minoritas. Hanya sebagian kecil responden (1,63%) yang menyatakan sangat paham mengenai kebijakan pariwisata halal. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan pariwisata halal masih perlu ditingkatkan. Pemahaman yang rendah di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsep, manfaat, dan implikasi dari pariwisata halal. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap kebijakan pariwisata halal karena Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pariwisata halal dapat menyebabkan kesalahpahaman dan keraguan terhadap kebijakan tersebut.

Ditemukan bahwa Beberapa responden mungkin khawatir bahwa pariwisata halal dapat menimbulkan diskriminasi terhadap wisatawan non-Muslim. Kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa akibat penerapan pariwisata halal. Hal ini dukung bahwa responden berpendapat bahwa urusan agama adalah hak individu dan tidak perlu diatur secara ketat dalam konteks pariwisata. Responden lain menyatakan bahwa terdapat prioritas lain yang dianggap lebih penting, seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, atau pelestarian lingkungan. Kebijakan pariwisata halal mungkin tidak dianggap sebagai prioritas utama bagi sebagian masyarakat.

Jika dikelompokkan berdasarkan kriteria ACES 3.0 dari GMTI 2024 maka berikut distribusi topik persentase yang dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Distribusi Topik Aspirasi berdasarkan Aces 3.0 (Hasil Analisis, 2024)

Didapatkan informasi bahwa aspirasi yang muncul terkait pariwisata mengenai topik pelayanan. Dengan mayoritas sentimen yang positif, maka disimpulkan bahwa pariwisata halal dapat memberikan layanan yang baik bagi para wisatawan. Berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung serta mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, dan infrastruktur di Kabupaten Bandung, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Bandung:

1. Pemerintah daerah perlu memperkokoh kerangka regulasi yang komprehensif dan spesifik mengenai pariwisata halal, mencakup aspek-aspek seperti sertifikasi halal, standar pelayanan, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Selain itu, pembentukan badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan pariwisata halal dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan. Sejalan dengan itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pariwisata halal perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, tidak hanya kepada pengelola desa wisata, tetapi juga kepada masyarakat luas, dengan memanfaatkan program edukasi yang menarik dan mudah dipahami.
2. Selain menyediakan fasilitas dasar seperti makanan halal dan tempat ibadah yang representatif, desa wisata perlu mengembangkan produk dan layanan yang unik dan inovatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Misalnya, paket wisata yang memadukan wisata alam dengan kegiatan keagamaan, atau produk kerajinan tangan yang bertemakan Islam. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata halal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola desa wisata, pemandu wisata, dan pelaku usaha pariwisata halal secara berkala.
3. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen destinasi, aplikasi mobile untuk pemesanan layanan, dan platform online untuk promosi dan pemasaran, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pariwisata halal. Selain itu, penguatan kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Pengembangan branding pariwisata halal yang kuat dan menarik, serta pemasaran yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi kunci keberhasilan.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pariwisata halal untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian mengindikasikan adanya dukungan yang kuat dari mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung terhadap penerapan kebijakan pariwisata halal di desa wisata. Mereka melihat potensi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang substansial dari pengembangan sektor ini. Meskipun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata halal melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Aspirasi masyarakat menunjukkan keinginan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata halal. Partisipasi ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Di sisi lain, beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi diskriminasi terhadap wisatawan non-Muslim. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata halal dilakukan secara inklusif dan menghargai keberagaman.

Acknowledge

Penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya penelitian ini dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk keluarga, dosen pembimbing, penguji, rekan-rekan mahasiswa, serta masyarakat Kabupaten Bandung. Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] Irvandi, Irawan, B., & Nurdiawan, O. (2023). Naive Bayes Dan Wordcloud Untuk Analisis Sentimen Wisata Halal Pulau Lombok. *Infotech Journal*, 9(1), 236–242. <https://doi.org/10.31949/Infotech.V9i1.5322>
- [2] Parhan, M., Rindu Fajar Islamy, M., Budiyantri, N., Hari Nugraha, R., Eka Subakti, G., & Fuaddin, A. (2021). The Opportunities and Challenges Halal Tourism In Bandung-Indonesia Regency. 9(1), 2338–8633.
- [3] Wulandari, R. D., Indahsari, K., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). 1 St E-Proceeding Senriabdi 2021 Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada. In *Masyarakat Universitas Sahid Surakarta* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/Senriabdi>
- [4] Satrio Wibowo, M., & Arviana Belia, L. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. 6.
- [5] Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif Di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 4(2), 968–973. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V4i2.781>
- [6] Husein, M., Pratidina, G., Goris Seran, G., & Author, K. (2024). Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses (Vol. 3, Issue 1).
- [7] Anissa Fitri Chaerunissa, & Asep Hariyanto. (2023). Dampak Industri Pariwisata terhadap Perekonomian Masyarakat di Kampung Seni dan Budaya Jelekong. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 107–114. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i2.2742>
- [8] Wulandari, R. D., Indahsari, K., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). 1 st E-proceeding SENRIABDI 2021 Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian kepada. In *Masyarakat Universitas Sahid Surakarta* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/SENRIABDI>.
- [9] Virgi Fathurrahman, Ina Helena Agustina, & Riswandha Risang Aji. (2024). Partisipasi Masyarakat Desa Jagara dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota (JRPWK)*, 4(1).